

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

1) Pantai Plengkung (G- Land)

Pantai Plengkung atau lebih dikenal dengan nama *G-Land*, adalah pantai yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Plengkung dapat dicapai selama setengah hari perjalanan darat dari Bali. Pantai Plengkung juga bisa dicapai dengan boat sewaan dari Bali.

Pantai Plengkung berlokasi di bagian tenggara Pulau Jawa, berada dalam gugusan pantai selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga Pantai Plengkung termasuk pantai berombak besar. Ombak besar ini dihasilkan oleh sistem bertekanan rendah yang berasal dari selatan (Antartika). Pantai Plengkung juga terletak di sisi timur Teluk Grajagan, maka dari itu sisi kanan Pantai Plengkung memiliki ombak lebih dominan. Ombak Panjang Plengkung berbentuk memanjang, tinggi, dan berkecepatan tinggi. Ombak Pantai Plengkung juga membentuk tabung ombak hampir sempurna sehingga menjadi favorit para penggemar olahraga surfing.

2) Kawah Ijen

Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.443 m dan telah empat kali meletus (1796, 1817, 1913, dan 1936). Untuk mendaki ke gunung ini bisa berangkat dari Bondowoso ataupun dari Banyuwangi.

3) Teluk Hijau

Teluk Hijau adalah obyek wisata pantai yang berada dalam areal Taman Nasional Meru Betiri, Sarongan, Pesanggaran, Banyuwangi. Lokasinya berjarak sekitar 90 kilometer dari Kota Banyuwangi. Dinamai demikian dikarenakan air lautnya yang cenderung berwarna hijau...

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kondisi Pelayanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memberikan beberapa pelayanan, yaitu :

- a. Pelayanan di bidang umum dan kepegawaian
- b. Pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan
- c. Pelayanan di bidang penyusunan program
- d. Pelayanan di bidang pemberdayaan seni dan budaya
- e. Pelayanan di bidang adat budaya
- f. Pelayanan di bidang pemberdayaan sarana wisata
- g. Pelayanan di bidang sumber daya alam
- h. Pelayanan di bidang Informasi budaya dan wisata
- i. Pelayanan di bidang promosi budaya wisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2011, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- d. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
- g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. ***Sekretaris*** mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- b. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
- c. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas.
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- 3) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satua kerja perangkat daerah terkait.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas.
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. ***Kepala Bidang Pariwisata*** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Parwisata mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan Obyek wisat,sarana,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata:.. .

- b. Pemberian pertimbangan teknis pemrosesan perizinan di bidang usaha Obyek Wisata, Taman Rekreasi, Akomodasi, rumah makan, bar dan biro perjalanan wisata.
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan obyek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
- d. Pembinaan dan mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sadar wisata;
- e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, sarana wisata dan usaha jasa kepariwisataan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Bidang Pariwisata sesuai dengan rencana Dinas;
- 2) Membina dan mengembangkan Obyek Wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
- 3) Memberikan pertimbangan teknis pemrosesan perizinan dibidang usaha Obyek Wisata, Taman Rekreasi, Akomodasi,

- 4) Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan obyek wisata ,sarana ,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam Wisata;
- 5) Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sadar wisata;
- 6) Menyusun bahan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek wisata ,sarana wisata dan usaha jasa kepariwisataan ;
- 7) Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. **Kepala Bidang Pemasaran** mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan jaringan Usaha pemasaran wisata.

Kepala Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan upaya pengembangan pemasaran wisata .
- 2) Peningkatan kerjasama pemasaran baik didalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah ;
- 3) Peningkatan koordinasi pengembagan jaringan aksesibilitas ;

- 4) Pelaksanaan promosi intensif di dalam dan di luar negeri ;
- 5) Perancangan dan mensinergikan pembuatan even-even untuk meningkatkan kunjungan ;
- 6) Peningkatan kemitraan pengembangan produk dan promosi ;
- 7) Peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan ;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Bidang Pemasaran sesuai dengan rencana Dinas ;
- b. Melaksanakan upaya pengembangan pemasaran wisata ;
- c. Meningkatkan kerja sama pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah ;
- d. Meningkatkan kekoordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas
- e. Melaksanakan promosi intensif di dalam dan di luar negeri ;
- f. Merancang dan mensinergikan pembuatan even-even untuk meningkatkan kunjungan ;
- g. Meningkatkan kemitraan pengembangan produk dan promosi ;
- h. Meningkatkan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan ;
- i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan ;

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Visi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan perwujudan dalam lingkup yang lebih kecil dari Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015. Untuk itu Visi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga merupakan manifestasi sistem yang saling terkait untuk saling menyukseskan satu dengan yang lainnya

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah Pasangan H. Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko telah membuat visi Kabupaten Banyuwangi 2010 -2015 sebagai berikut:

“ Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia “.

Penjelasan Visi :

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa

kehilangan adanya kerjasama dengan daerah daerah lain yang saling menguntungkan.

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan
3. Berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental - spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia.
4. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai.

5. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan

Berdasarkan rumusan Visi Bupati Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Visinya sebagai berikut:

Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan visi sebagai berikut :

”Mewujudkan Banyuwangi Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional Yang Berbasis Kebudayaan Dan Potensi Alam Serta Lingkungan.”

Visi :

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi diperlukan dukungan semua pihak untuk penciptaan kondisi keamanan yang kondusif, bersih, indah, aman, ramah, dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang mendorong pertumbuhan sektor kebudayaan dan pariwisata serta membangun citra Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat wisata yang berbasis kebudayaan dan potensi alam serta lingkungan sekaligus terposisi sebagai pintu gerbang pariwisata.

Misi :

Misi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya, untuk itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam 2 (dua)

tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya, salah satunya penetapan misi, dimana misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi antara lain :

1. Memberikan pelayanan prima terhadap para pelaku usaha industri pariwisata, wisatawan, dan seluruh lapisan masyarakat;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparat, para pelaku usaha industri pariwisata dan peran serta masyarakat;
3. Memasyarakatkan sadar wisata dalam rangka terwujudnya sapta pesona, promosi dan hubungan lembaga wisata;
4. Menumbuhkembangkan kemitraan dengan para pelaku usaha industri pariwisata dan masyarakat;
5. Menumbuhkembangkan potensi objek wisata yang berdaya saing;
6. Menumbuhkembangkan nilai luhur budaya masyarakat Kab. Banyuwangi;
7. Menggalakkan pelestarian dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan.
8. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi seni dan budaya, adat-istiadat serta peninggalan sejarah menjadi destinasi wisata.
9. Menciptakan iklim investasi dan investor yang kondusif dan program isentif dibidang pariwisata.
10. Menciptakan dan mendorong kerjasama dengan sektor lainnya dalam rangka menciptakan usaha pariwisata.

Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 - 2015, adalah :

- a. Menjamin adanya konsistensi Pelaksanaan Program terhadap masalah dan potensi daerah serta kegiatan rutin sesuai dengan ketentuan pembangunan pariwisata dan kebudayaan daerah.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah difokuskan secara partisipatif dengan semua Stake Holder pelaku pariwisata mulai dari penetapan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sehingga dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran harus mengacu pada renstra dinas yang berpedoman pada RPJMD Kab. Banyuwangi Tahun 2010 – 2015.
- c. Memperkuat landasan penetapan program dan kegiatan tahunan dinas secara kronologis dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bagi pelaku-pelaku pariwisata
- e. Mewujudkan sapta pesona pariwisata
- f. Mewujudkan dan meningkatkan fasilitas yang memadai di lingkungan destinasi
- g. Mengembangkan pola partisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata
- h. Mengamankan dan mengkondisikan bangunan dan situs-situs dan peninggalan sejarah

- i. Menciptakan dan mencari ikon Banyuwangi yang tepat sesuai dengan sejarah
- j. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan berkebudayaan sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan,
- k. Menciptakan Paket-paket wisata dengan bekerjasama dengan travel-trevel dan biro perjalanan wisata
- l. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pelaku-pelaku wisata
- m. Melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai tradisi sebagai akar budaya lokal,
- n. Meningkatkan seluruh sumber daya pariwisata agar lebih profesional

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

:

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan, diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program – program dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agressive but attainable, result oriented and time bond. Guna

memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dari pengertian tersebut diatas, maka sasaran harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki adalah :

- Terlaksananya sapta pesona pariwisata
- Terwujudnya masyarakat akan sadar wisata
- Terwujudnya Branch image positif di mata wisatawan
- Terwujudnya peningkatan ekonomi untuk masyarakat
- Terwujudnya kenyamanan perjalanan bagi wisatawan
- Terjaganya peninggalan-peninggalan sejarah untuk generasi penerus
- Terjaganya seni budaya dan adat istiadat Banyuwangi
- Terwujudnya peningkatan arus kunjungan wisatawan
- Terwujudnya pelayanan wisatawan yang prima

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang digunakan adalah akselerasi program yaitu dengan menggerakkan potensi dan penunjang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Banyuwangi mempunyai daya tarik

Kebijaksanaan dan strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian Misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan,

tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. *Koordinasi*; adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. *(Friendly system)*; adalah system yang menyenangkan wisatawan;
3. *(Improve)*; adalah upaya untuk memperbaiki tingkat pelayanan kepada wisatawan secara continue;
4. *(Exceed Expectations)*; adalah upaya yang dilakukan untuk melampaui/ memenuhi yang diharapkan wisatawan untuk menguasai pasar dengan menetapkan standar pelayanan yang tinggi dan mengkomunikasikan standarisasi tersebut kepada staf;
5. *Motivasi*; adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus-menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
6. *Eligible*; mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu memuaskan pelanggan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan;
7. *Coorporate culture*; penciptaan kultur organisasi yang didedikasikan untuk pelayanan prima. Penekanannya adalah bagaimana

membangun nama baik dimata wisatawan, penciptaan citra organisasi (*brand image*) melalui pelayanan yang memberikan kepuasan wisatawan.

sebagai daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan momentum :

1. Penetapan Kata Kunci kepariwisataan kepariwisataan “ *BANYUWANGI THE SUNRISE OF JAVA* “, karena matahari terbit paling awal di BANYUWANGI.
2. Penetapan Gandrung sebagai Maskot Pariwisata Banyuwangi sesuai SK Bupati Banyuwangi nomor. 173 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002
3. Pembangunan Segi Tiga Berlian sebagai ikon pariwisata alam Banyuwangi
4. Mewujudkan Banyuwangi sebagai “*City of Art*“ dengan keragaman budaya yang dimiliki, akar udaya lokal yang kuat dan interaksi budaya antar etnis yang ada serta letak geografis yang terletak di persimpangan.
5. Mendorong terlaksananya investasi di Bidang Pariwisata dengan memberlakukan program isentif

➤ **KEBIJAKAN :**

Untuk mencapaitujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang diambil adalah :

1. Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder
 - b. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
 - c. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
2. Bidang Pemasaran
 - a. Peningkatan promosi melalui berbagai media
 - b. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata yang telah maju
 - c. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kab.Banyuwangi dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah
3. Bidang Kebudayaan
 - a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah
 - b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
 - c. Meningkatkan seni dan budaya Banyuwangi ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Didalam sebuah industri pariwisata dibutuhkan adanya kerjasama antar dinas terkait dengan para

stakeholder, hal ini terkait dengan masalah jaringan promosi tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi agar dapat dikenal secara luas dengan skala nasional maupun internasional, dengan demikian komunikasi antar pihak-pihak dapat bersinergi dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Bapak MY Bramudya Menjelaskan:

“Begini mas, didalam Implementasi kebijakan khususnya tentang pengembangan pariwisata ini harus banyak melibatkan berbagai pihak atau stakeholder. karena ini semua menyangkut kepentingan orang banyak dan akan dilaksanakan dalam masyarakat yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait contohnya anatr pemerintah daerah dengan pemerintah dinas pariwisata dan para agen travel. dan pada akhir tahun 2013 kemarin kami selaku dinas pariwisata berhasil menjalin kerjasama dengan bandara juanda agar foto-foto tempat wisata di Banyuwangi bisa ditampilkan di bandara, sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wisata Kbpupaten Banyuwangi. Dengan demikian diupayakan agar Perbub ini berjalan dengan semestinya.” (Hasil wawancara 27 Agustus 2014)

Dari hasil wawancara dengan plt. Kepala dinas kebudayaan dan Pariwisata dapat diketahui bahwa Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata sangat diperlukan agar kemajuan industri pariwisata di

Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi dapat terus ditingkatkan.

b. Pengembangan Kerjasama Dengan Stake holder

Pemerintah daerah harus benar-benar jeli dan paham didalam menjalin kerjasama dengan stake holder dan menilai para agensi travel atau pihak terkait, agar didalam menjalankan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ini tidak ada hambatan-hambatan. Karena didalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan wewenang yang dapat mengganggu dan dapat menghambat implementasi. Untuk itu pemerintah harus benar-benar dapat mengkoordinasikan antar berbagai pihak agar bisa mendukung dan melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan bersama.

“ Yang dimaksud pengembangan kerjasama dengan stake holder disini yaitu setiap agen pelaksana atau pihak-pihak terkait berbeda dalam menyikapi permasalahan yang ada, dan tidak jarang ditemukan adanya kepentingan-kepentingan pribadi antara satu dengan yang lain. Dan saya bisa jamin mas, jika terjadi demikian suatu implementasi tidak akan berjalan dengan semestinya dan cenderung akan menghambat. Untuk itu dibutuhkan kejelihan dan mampu memahami para agen pelaksana mas, supaya sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan bersama khususnya dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ini “(Hasil wawancara 27 Agustus 2014)

Dari hasil petikan wawancara dengan plt. Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata bisa ditarik kesimpulan

atau dapat diketahui bahwa didalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan harus melibatkan berbagai pihak, kemudian pemerintah harus jeli dan paham dalam membaca peluang dan bekerja sama dengan para stake holder. Karena tidak jarang ditemukan penyelewengan wewenang. Dengan demikian suatu implementasi kebijakan bisa berjalan searah dan sesuai dengan yang diinginkan bersama.

c. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, maka dipastikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut, contohnya datang ke kawasan segi tiga emas. Disini tidak hanya wisatawan lokal yang datang tetapi juga wisatawan mancanegara dengan demikian tidak hanya masyarakat setempat yang diuntungkan, pemerintah juga dapat merasakan dampaknya yaitu dapat menambah income atau devisa negara.

Tabel 1

Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi Tahun
2014:

Wisatawan	Tahun		
	2012	2013	2014-Bulan Oktober
Mancanegara	5.502	10.462	13.583
Domestik	860.831	1.057.952	1.457.451

Sumber: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Di lihat dari tabael di atas, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun semakin meningkat, dapat disimpulkan bahwa pariwisata Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang pesat.

Hasil wawancara dengan Pak Imron pemilik warung di Paltuding Ijen menjelaskan:

“Jadi begini mas, sebenarnya saya tidak tahu menahu mengenai program kebijakan perbub tersebut, akan tetapi semenjak infrastruktur menuju kawah Ijen dan khususnya di Paltuding ini dibenahi dan sering juga diadakan event atau acara-acara yang bersifat menghibur masyarakat. Seperti contoh Tour de Ijen dan acara Jazz festival, wisatawan lokal maupun mancanegara banyak sekali yang berkunjung ke sini. rata-rata tujuan wisatawan kesini untuk melihat fenomena alam Blue fire mas.” (hasil wawancara tanggal 1 oktober 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Dariharto selaku sub bagian pariwisata, beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini kami selalu berupaya untuk mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki sehingga upaya untuk peningkatan potensi wisata dapat berjalan dengan maksimal. Berbagai upaya kami lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu mulai dari peningkatan potensi masyarakat dan upaya melalui penggunaan media untuk mengakses potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi”. (hasil wawancara tanggal 27 agustus 2014)

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Pada saat ini media yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata jauh lebih banyak dari periode sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendorongnya. Teknologi ini sudah banyak diadopsi oleh kalangan pemerintahan, pendidikan, bisnis dan lainnya sebagai sarana promosi, desiminasi informasi dan transaksi, oleh karena itu muncul istilah e-goverment, e-learning, e-business, e-commerce dan lainnya.

Bahwa dunia pariwisata yang menjadi salah satu bidang garapan pemerintah sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi sebagai implementasi dalam e-goverment untuk mempublikasikan dan memasarkan potensi wisata daerah. Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata di Indonesia

masih lemah, sampai saat ini belum ada website khusus yang menyediakan informasi lengkap mengenai sistem pariwisata di Indonesia.

Pengembangan kepariwisataan Indonesia masih belum terpadu dan memiliki akses terbatas pada lingkup nasional. Disamping itu pengembangan kepariwisataan Indonesia tidak memiliki hubungan dengan kepariwisataan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan Singapura). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia belum optimal dalam mengembangkan e-Tourism.

Hasil wawancara dengan Bapak Akmad Syamsudin beliau selaku sub bagian pemasaran menjelaskan:

“Begini mas, saya selaku sub bagian pemasaran telah berupaya melakukan publikasi dan promosi melalui berbagai media sosial seperti facebook dan twitter, didalam akun tersebut tim kami memposting foto-foto tentang segitiga berlian tersebut (Ijen, Plengkung, Teluk hijau). Hal tersebut kami lakukan agar masyarakat luar Banyuwangi dapat melihat salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu tim kami juga sedang berupaya membuat website mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, disitu dilampirkan mengenai hotel atau pengianapan, rumah makan, rute lokasi obyek wisata dan sebagainya”(Hasil wawancara tanggal 29 Agustus 2014)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi :

a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung terlaksananya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terdiri atas keterlibatan semua pihak khususnya para agen pelaksana, masyarakat, dan adanya pedoman Rencana Strategis.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing Faktor Pendukung implementasi kebijakan pengembangan Pariwisata:

1). Keterlibatan semua pihak khususnya para agen pelaksana

Keterlibatan semua pihak khususnya dinas pariwisata, stake holder, dan masyarakat dalam upaya implementasi kebijakan agar terjalin kerjasama dengan baik. Adanya pembagian tugas yang jelas dan sesuai tanggung jawab pada para pelaku agen pelaksana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, dan kesadaran dalam diri untuk terlibat dalam proses memajukan pariwisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Seperti yang dijelaskan oleh plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Bapak MY Bramudya Menjelaskan:

“ Dalam suatu implementasi kebijakan pengembangan pariwisata khususnya tentang peningkatan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi harus ada pihak- pihak yang ikut mendukung bukan hanya masyarakat mas, semua pihak juga harus ikut andil dan bekerja sama dalam mensukseskan program itu sendiri. Agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan ada korelasi antar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.(Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2014)

Dengan adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dan masyarakat, maka pelaksanaan program-program akan tercapai dengan apa yang diinginkan.

2). Antusiasme Masyarakat

Kunci kesuksesan suatu program atau implementasi salah satunya adalah Partisipasi Masyarakat. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik, ini semua berkat besarnya antusiasme masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Priyono selaku tokoh masyarakat setempat:

“ Memang Antusiasme masyarakat tinggi mas dalam melaksanakan program tersebut dan ini semua berkat tim pelaksana dan kerjasama masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang diharapkan jika tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi, suatu program tidak akan berjalan dengan baik.(Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2014)

Jadi suatu program bisa dikatakan sukses dan berhasil jika didalam pelaksanaannya didukung oleh berbagai pihak khususnya masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaannya.

3) Adanya buku Rencana Strategis

Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010- 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010- 2015 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010- 2015 keberadaannya merupakan amanah yang harus diikuti sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara terintegratif terpadu dengan dokumen perencanaan yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sehingga terjadinya sinkronisasi berbagai program pembangunan yang saling mendukung.

Buku pedoman ini sangatlah penting menjadi tolok ukur, isi buku tersebut berisi tentang pedoman deskripsi, petunjuk teknis, indikator penilaian, hingga

indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan dasar inilah peneliti melakukan studi komperasi anantara apa yang tertulis dalam buku pedoman dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Selain itu tidak lupa peneliti melakukan pula studi literatur dengan memanfaatkan teori-teori yang berkaitan dalam menganalisis data-data tersebut.

Adanya buku pedoman Rencana Strategis (**RENSTRA**) sebagai petunjuk dan pedoman teknis dalam implementasi kebijakan perbub no.5 tahun 2011 di Banyuwangi sangat membantu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Bapak MY Bramudya Menjelaskan:

“ Begini mas buku pedoman Renstra ini sangat membantu karena didalamnya terdapat tujuan, tata cara, dsb. Dengan demikian tujuan didalamnya itu menjadi ukuran pertimbangan untuk memilih prioritas program.

Dengan adanya buku pedoman Renstra tersebut maka secara tidak langsung membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program implementasi kebijakan.

b. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat terlaksananya Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata terdiri atas Lemahnya Pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata, belum tersedianya Data Base yang akurat tentang Aspek kebudayaan dan kepariwisataan.

Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata disini menjadikan wisatawan enggan untuk berkunjung ke obyek wisata, maka dari itu dinas terkait dan para stake holder harus jeli dalam membenahi infrastruktur dan sarana yang mendukung agar obyek wisata terlihat menarik untuk dikunjungi. selain itu ada faktor yang menjadi penghambat lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata anatara lain kurangnya promosi atau sosialisasi kepada publik. Karena kedua faktor ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pengelolaan pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengelola obyek wisata di plengkung pak Jarwadi menjelaskan:

“Begini mas, keberhasilan suatu pengelolaan suatu pariwisata harus dikelola dengan mantang-matang dan

melaui mekanisme yang benar, agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu mas, pihak pengelola harus pintar menarik pengunjung dengan cara sosialisasi atau promosi dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Agar pengunjung bisa merasa puas dan nyaman berada ditempat wisata tersebut".(Hasil wawancara)

Di dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata harus banyak memperhatikan segala aspek anantara lain memperbaiki infrastruktur, sosialisasi atau promosi kepada publik, agar pengelolaan pariwisata bisa berjalan dengan apa yang diinginkan.

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa upaya Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Keadaan tersebut dapat dilihat dari upaya Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2004:65) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Agar implementasi kebijakan di atas dapat berjalan efektif, terdapat empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu *commucation, resource, dispotition or attitudes, dan bureaucratic structure*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan / atau public, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Nugroho, 2006:40) oleh karenanya, didalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terkait untuk bisa saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka implementasi program kebijakan khususnya pariwisata. Berikut akan disajikan analisis setiap point berdasarkan fokus yang telah dijabarkan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata.

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Dalam suatu implementasi kebijakan harus melibatkan banyak pihak, diantaranya pemerintah daerah, dinas pariwisata, stake holder terkait dan masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disini tidak hanya *policy making* yang berperan penting, tetapi juga partisipasi

masyarakat. Dalam Undang - Undang nomor 9 tahun 1990 Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan tersebut adalah masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Harapan dengan kebijakan konservasi yang bersinergi dengan pariwisata maka pemeliharaan bangunan kota lama dapat terpelihara dengan adanya kegiatan pariwisata yang memperoleh pemasukan ekonomi, dan dari kegiatan pariwisata juga pelestarian bangunan tetap terpelihara sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

Aktivitas dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu bentuk kerja sama yang memiliki peran penting dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh wilayah. Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu mengenai aktivitas operasional yang dilakukan oleh dinas yang merupakan suatu aktivitas dimana seluruh pihak dilibatkan untuk memberikan dukungan secara maksimal terkait dengan upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh wilayah terkait dengan potensi wisata yang dimiliki.

b. Pengembangan Kerjasama Dengan Stake holder

Pengembangan kerjasama dengan para pelaku bisnis atau usaha merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dinas dimana upaya untuk memberikan dukungan terkait dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah selalu memberikan suatu jaminan bahwa segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya persamaan misi dan visi sehingga segala bentuk program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait selalu terjadi, namun demikian upaya pencapaian tujuan sesuai dengan Perbub No.5 tahun 2011 harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berbagai upaya atau kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan dukungan atau masukan ketika merumuskan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut menjadi kebijakan bersama yang menjadikan suatu bentuk pelaksanaan atas implementasi wewenang sesuai dengan penetapan tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Upaya ini menjadikan kebijakan yang ditetapkan merupakan kebijakan bersama dan menjadi tuga

bersama untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik terjadi ketika aktivitas atau kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan. Kondisi ini menjadi suatu tolak ukur atas keberhasilan program pariwisata yang ditetapkan oleh dinas sehingga memberikan dukungan dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Secara ekonomi adanya peningkatan pariwisata akan memberikan suatu bentuk dukungan terhadap kondisi ekonomi yang dimiliki oleh daerah sehingga adanya jaminan atas tata kelola ekonomi yang lebih baik atas terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Tingginya tingkat wisatawan lokal yang datang tetapi juga wisatawan mancanegara dengan demikian tidak hanya masyarakat setempat yang diuntungkan, pemerintah juga dapat meraskan dampaknya yaitu dapat menambah *income* atau devisa negara juga mengalami peningkatan.

Peningkatan secara ekonomi secara maksimal dirasakan oleh masyarakat yang terdapat disekitar tempat wisata, dimana bentuk-bentuk usaha yang mendukung secara perekonomian menjadikan peningkat taraf hidup yang lebih baik.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Memasuki era yang serba digital ini pemanfaatan teknologi informasi didalam memajukan bidang pariwisata sangat diperlukan karena masyarakat sekarang sudah sangat familiar dengan media sosial, media sosial tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat sekarang. Teknologi ini sudah banyak diadopsi oleh kalangan pemerintahan, pendidikan, bisnis dan lainnya sebagai sarana promosi, desiminasi informasi dan transaksi, oleh karena itu muncul istilah e-goverment, e-learning, e-business, e-commere dan lainnya.

Bahwa dunia pariwisata yang menjadi salah satu bidang garapan pemerintah sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi sebagai implementasi dalam e-goverment untuk mempublikasikan dan memasarkan potensi wisata daerah. Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata di indonesia masih lemah, sampai saat ini belum ada website khusus yang menyediakan informasi lengkap mengenai sistem pariwisata di Indonesia.

Pengembangan kepariwisataan Indonesia masih belum terpadu dan memiliki akses terbatas pada lingkup nasional. Disamping itu pengembangan kepariwisataan Indonesia tidak memiliki hubungan dengan kepariwisataan dengan negara tetangga

(Malaysia, Thailand, dan Singapura). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia belum optimal dalam mengembangkan e-Tourism.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Pengembangan Pariwisata terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan penndukung, dimana beberapa faktor yang mendukung dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Keterlibatan semua pihak khususnya para agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata khususnya tentang peningkatan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi harus ada pihak-pihak yang ikut mendukung bukan hanya masyarakat, semua pihak juga harus ikut andil dan bekerja sama dalam mensukseskan program itu sendiri. Agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan ada korelasi antar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Adanya keterlibatan tersebut menjadikan seluruh elemen yang terdapat di dinas maupun diluar mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Selanjutnya dalam upaya untuk memberikan dukungan untuk memaksimalkan potensi daerah sehingga seluruh elemen yang terdapat di instansi dapat diselesaikan secara maksimal.

2). Antusiasme Masyarakat

Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan program tersebut karena adanya kerja sama yang baik antara dinas dengan instansi-instansi yang terkait. Upaya tim pelaksana dan kerjasama masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang diharapkan jika tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga suatu program akan berjalan dengan baik.

Adanya antusiasme masyarakat menjadi dukungan secara maksimal sehingga program yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga program-program yang ditetapkan oleh dinas mampu dimaksimalkan dalam pencapaiannya. Masyarakat menjadi daya dorong yang tinggi atas segala bentuk program yang telah ditetapkan sehingga instansi mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bentuk-bentuk dukungan masyarakat yaitu berupa dukungan masyarakat untuk menjalankan program-

program yang telah ditetapkan oleh dinas sebagai upaya memaksimalkan potensi wisata daerah.

3) Adanya Buku Rencana Strategis

Pedoman Renstra ini sangat membantu karena didalamnya terdapat tujuan, tata cara dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan didalamnya itu menjadi ukuran pertimbangan untuk memilih prioritas program. Dengan adanya buku pedoman Renstra tersebut maka secara tidak langsung membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program implementasi kebijakan.

Program implementasi tersebut terkait erat dengan upaya dinas dalam penyusunan setiap ketentuan atau kebijakan yang akan ditetapkan. Kebijakan yang tertuang di Renstra yang secara lengkap akan memberikan jaminan bahwa program telah disusun secara sistematis sehingga memberikan dukungan terkait dengan upaya pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Adanya upaya dari dinas untuk menyusun pedoman Renstra sehingga upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah

menjadikan upaya dinas lebih maksimal dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

b. **Faktor Penghambat**

Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata disini menjadikan wisatawan kurang memiliki minat untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Upaya pengelolaan selalu menjadi faktor penentu atas keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga program yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya dari dinas terkait dan para *stake holder* harus jeli dalam membenahi infrastruktur dan sarana yang mendukung agar obyek wisata terlihat menarik untuk dikunjungi. selain itu ada faktor yang menjadi penghambat lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata antara lain kurangnya promosi atau sosialisasi kepada publik. Karena kedua faktor ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pengelolaan pariwisata.

Keberhasilan suatu pengelolaan suatu pariwisata harus dikelola dengan mantang-matang dan melalui mekanisme yang benar, agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu mas, pihak pengelola harus pintar menarik pengunjung dengan cara sosialisasi atau promosi dan

memperbaiki infrastruktur yang ada. Agar pengunjung bisa merasa puas dan nyaman berada ditempat wisata tersebut. Di dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata harus banyak memperhatikan segala aspek antara lain memperbaiki infrastruktur, sosialisasi atau promosi kepada publik, agar pengelolaan pariwisata bisa berjalan dengan apa yang diinginkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang dimiliki suatu tempat wisata sehingga memberikan daya tarik terhadap wisatawan. Ketertarikan seorang wisatawan terhadap suatu tempat wisata terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga jaminan atas kepuasan wisatawan dapat terwujud secara maksimal.